Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 30657-30665

Pengaruh Tingkat Inflasi, Upah Minimum, Dan Pengangguran Terhadap Daya Beli Masyarakat Di Indonesia Tahun 2025

Anindhita Rahima Putri, Rajwa Hamdani Valeska, Nayla Azrina, Rihlah Syaima, Kamila Puja Primaniza, Muhammad Rafi, Fitri Amalia

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

rahimaanindhita@gmail.com, rhvaldan@gmail.com, naylaazrinaa@gmail.com, rihlahsyaima@gmail.com, kamilafuja@gmail.com, rafimuhammad281006@gmail.com, fitri.amalia@uinjkt.ac.id

Published: June, 2026

ABSTRAK

Studi ini urgensinya ialah guna mengkaji sejauh mana inflasi, UMP, serta TPT memberikan pengaru terhadap kemampuan konsumsi masyarakat Indonesia pada tahun 2025. Pendekatan yang digunakan bersifat kuantitatif dengan memanfaatkan data lintas wilaya (cross section) yang mencakup seluru 34 provinsi di Indonesia. Kemampuan daya beli masyarakat ditempatkan sebagai variabel terikat, sementara inflasi, upah minimum, dan pengangguran berperan sebagai variabel bebas tes hipotesis dilaksanakan memanfaatkan teknik regresi linier berganda berbantuan perangkat SPSS. Temuan studi mengindikasikan bahwa kenaikan inflasi berdampak negatif pada kemampuan konsumsi masyarakat, yakni lonjakan harga komoditas dan layakan mendorong penurunan daya beli. Di sisi lain, upa minimum terbukti berpengaru positif karena peningkatan pengahasilan pekerja mendukung pemenuhan melalui berkurangnya pendapatan kelompok yang tidak memiliki pekerjaan. Secara bersama sama, tiga variabel itu berdampak bermakna terhadap daya beli masyarakat Indonesia di 2025.
Kata Kunci: inflasi, upah minimum, pengangguran, daya beli masyakarat

ABSTRACT

The study's main goal is to investigatw how inflation, the UMP, and TPT would affect the purchasing power of Indonesian society in 2025. Quantitative methods are used with all 34 cross-sectional data sets from Indonesian provinces. The presentation of inflation, minimum wage, and unemployment rates serves as independent variables, while buying power is positioned as the dependent variable. Hypothesis testing was conducted using multiple linear regression with SPSS software. The findings indicate that rising inflation negatively affects household consumption capacity, as increases in commodity and service prices reduce purchasing power. Conversely, minimum wage shows a positive effect, as higher worker income supports household consumption. Unemployment exerts a negative influence through reduced income among the jobless population. Simultaneously, all three variables significantly affect people's purchasing power in Indonesia in 2025.
Keywords: *inflation, minimum wage, unemployment, purchasing power.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creiatiiveicommons.org/liiceinseis/by/4.0

PENDAHULUAN

Kemampuan daya beli masyarakat ialah suatu tolok ukur utama memberi penilaian kesejahteraan ekonomi sebuah negara. Tinggi*n*ya daya beli mencerminkan kapasitas masyarakat dalam mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya sesuai dengan pendapatan yang dimiliki, baik kebutuhan primer maupun sekunder. Dalam konteks pembangunan ekonomi, daya beli tidak semata-mata menggambarkan kondisi kesejahteraan individu, tetapi juga menjadi indikator kondisi ekonomi secara makro. Mengingat konsumsi rumah tangga ialah elemen dominan terbentuknya PDB Indonesia, berubahnya tingkat daya beli masyarakat nantinya secara langsung berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi nasional (Mankiw, 2021).

Pada tahun 2025, perekonomian Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi konsumsi masyarakat. Gejolak ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, pergeseran kebijakan moneter, serta dinamika pasar tenaga kerja menjadi faktor-faktor yang turut membentuk kondisi ekonomi dalam negeri. Dalam situasi tersebut, kestabilan harga, tingkat pendapatan, serta

ketersediaan lapangan kerja menjadi penentu utama kemampuan masyarakat dalam mempertahankan konsumsinya. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai variabel-variabel yang memengaruhi daya beli menjadi dasar utama penyusunan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Suatu elemen utama yang bisa memberi pengaruh pada daya beli masyarakat ialah inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai kenaikan umum harga barang serta jasa di periode lama. Ketika daya beli masyarakat turub, mereka membeli lebih sedikit barang serta jasa, sehingga kenaikan inflasi jadi berpengaruh negatif pada pendapatan riil. Menurut Teori Kuantitas Uang Friedman (1968), jika jumlah uang beredar tumbuh lebih cepat daripada produksi barang dan jasa, maka harga total akan meningkat. Investasi dan konsumsi dapat didorong oleh tingkat inflasi yang rendah dan stabil, sementara daya beli keluarga dan kesejahteraan umum dapat berkurang oleh tingkat inflasi yang tidak terkendali dan berlebihan (Mankiw, 2021).

Upah minimum, seperti indikator penting lainnya, dipengaruhi oleh inflasi, yang pada gilirannya memengaruhi daya beli masyarakat. Pekerja harus memiliki cukup uang untuk menutupi biaya hidup dasar, sehingga pemerintah menetapkan standar dasar untuk upah mereka, yang disebut upah minimum. Menurut teori konsumsi Keynes (Keynes, 1936), karena sebagian besar pendapatan tambahan dialokasikan untuk kebutuhan, semakin banyak uang yang beredar di pasar publik berarti semakin besar pengeluaran. Menaikkan upah minimum akan meningkatkan pendapatan bersih pekerja, yang merupakan kabar baik bagi semua orang. Namun, hasil positif tersebut tidak selalu sebanding. Tanpa peningkatan produktivitas yang sepadan, kenaikan upah dapat berdampak negatif pada daya beli konsumen (Rama, 2001).

Daya beli juga dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan terbuka. "Pengangguran terbuka" ialah kondisi saat individu secara aktif mencari pekerjaan tetapi tidak menerima tawaran apa pun. Angka pengangguran yang tinggi mengidikasikan rendanya kemampuan perekonomian dan menyerap tenaga kerja, sehingga sebagian masyarakat keilangan sumber pendapatan utama. Ball dan Mankiw (2002) menyatakan bawa meningkatnya pengangguran mengurangi permintaan agregat akibat berkurangnya pendapatan ruma tangga yan digunakan untuk konsumsi. Dampaknya, daya beli masyarakat merosot dan aktivitas ekonomi menjadi tidak optimal. Pengangguran yang tinggi juga berpotensi memperlebar jurang ketimpangan pendapatan sekaligus meningkatkan angka kemiskinan yang pada ujungnya merugikan kesejateraan masyarakat secara menyeluruh.

Keterkaitan antara inflasi, upa minimum, dan pengangguran teradap daya beli masyarakat dapat dijelaskan melalui pendekatan makroekonomi. Inflasi cenderung menekan daya belimelalui kemiskinan arga barang dan jasa, upah minimumberpotensi meningkatkan daya beli lewat perbaikan pendapatan pekerja, sementara penganguran dapat menurunkan daya beli akibat hilangnya sumber pengasilan masyarakat. Ketiga variabel ini saling berinteraksi dalam memengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga yang merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia.

Secara empiris, terdapat perbedaan tingkat daya beli masyarakat antarprovinsi di Indonesia pada tahun 2025. Daya beli yang lebih tinggi umumnya ditemukan di Provinsi DKI Jakarta yang didukung oleh tingkat upah lebih tinggi, peluang kerja yang lebih luas, serta aktivitas ekonomi yang lebih berkembang dibandingkan daerah lain. Sebaliknya, beberapa provinsi di kawasan Indonesia Timur masih menghadapi tantangan berupa rendahnya pendapatan masyarakat, sempitnya peluang kerja, serta tingginya biaya distribusi barang yang berdampak pada rendahnya daya beli. Perbedaan ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi regional memainkan peran signifikan dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Beragam penelitian terdahulu telah mengonfirmasi bahwa inflasi, upah minimum, dan pengangguran merupakan variabel yang memiliki keterkaitan bermakna dengan daya beli masyarakat. Namun, besaran pengaruh masing-masing variabel kerap menunjukkan perbedaan tergantung pada karakteristik wilayah, rentang waktu penelitian, serta kondisi ekonomi yang menjadi konteks analisis. Oleh karena itu, kajian mengenai pengaruh inflasi, upah minimum, serta tingkat pengangguran terhadap daya beli masyarakat Indonesia pada 2025 menjadi relevan untuk dilaksanakan. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan faktor-faktor ekonomi yang paling dominan dalam memengaruhi daya beli masyarakat sekaligus jadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang urgensinya ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Teori Daya Beli Masyarakat

Yang dimaksud dengan "daya beli" adalah jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli oleh seseorang atau keluarga dengan pendapatan mereka pada titik harga tertentu. Daya beli merupakan indikator umum kesehatan ekonomi karena menunjukkan sejauh mana suatu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Keynes berpendapat bahwa tingkat konsumsi suatu masyarakat sebanding dengan pendapatannya (1936). Keynes berteori bahwa peningkatan pendapatan yang dapat dibelanjakan akan menyebabkan orang menghabiskan lebih banyak uang untuk produk dan jasa untuk konsumsi mereka. Ketika pendapatan meningkat sementara harga tetap stabil, daya beli meningkat.

Tingkat harga pasar untuk barang dan jasa memengaruhi daya beli seseorang bersamaan dengan pendapatannya. Konsep pendapatan riil menjelaskan hubungan antara pendapatan nominal seseorang dan kemampuan mereka membeli barang serta jasa. Maka karenanya, daya beli meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan riil dan menurun ketika harga melampaui pendapatan (Mankiw, 2021).

Sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi di tingkat makro, daya beli sangat penting karena pengeluaran konsumen merupakan mayoritas PDB. Ketika daya beli konsumen meningkat, permintaan produk dan jasa tumbuh, yang mendorong investasi, lapangan kerja, dan produksi. Sebaliknya, daya beli yang turun akan menghambat bertumbuhnya ekonomi dengan mengurangi permintaan gabungan (Samuelson & Nordhaus, 2019).

Teori Inflasi

Inflasi ialah tren umum dan jangka panjang kenaikan harga barang dan jasa. Meskipun penting bagi perekonomian secara keseluruhan, inflasi juga memiliki dampak signifikan pada kekayaan publik dan individu. Kelebihan permintaan agregat menyebabkan kenaikan harga ketika pasokan uang tumbuh lebih cepat daripada output ekonomi. Teori Kuantitas Uang oleh Milton Friedman (1968) mendefinisikan fenomena ini dalam uang.

Sebagai akibat dari daya beli yang lebih rendah, daya beli masyarakat menurun dalam ekonomi inflasi. Dengan anggaran yang sama, orang mungkin membeli lebih sedikit barang daripada sebelumnya. Yang paling terkena dampak adalah mereka yang hidup dengan pendapatan tetap, yang kurang mampu mengatasi kenaikan harga. Akibatnya, inflasi yang tidak terkendali dapat merusak kesejahteraan publik secara serius (Mankiw, 2021).

Inflasi juga mampu memengaruhi bagaimana masyarakat umum membelanjakan uang mereka. Orang biasanya mengurangi pengeluaran sesuatu takserta penting dan meningkatkan pengeluaran kebutuhan pokok ketika biaya kebutuhan pokok naik. Terlihat jelas dari perubahan pola pembelian ini bahwa ada korelasi negatif antara inflasi dan daya beli masyarakat. Kenaikan harga menggerogoti daya beli konsumen (Blanchard & Johnson, 2021).

Teori Upah Minimum

Sebagai batas bawah gaji, pemerintah menetapkan upah minimum untuk melindungi pekerja dan memastikan mereka memiliki cukup uang untuk memenuhi biaya hidup dasar. Tujuan penetapan upah minimum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, mengurangi ketidaksetaraan pendapatan, dan mempertahankan tingkat konsumsi masyarakat (Bird & Manning, 2008).

Teori Upah Efisiensi mengusulkan bahwa upah yang meninggi mampu menaikan produktivitas tenaga kerja dengan meningkatkan motivasi, kesehatan, dan kepuasan kerja. Jika produktivitas meningkat, hal itu dapat memiliki efek pengganda pada output bisnis dan perekonomian (Akerlof & Yellen, 1986).

Ketika upah minimum dinaikkan, hal itu membantu keluarga memperoleh lebih banyak uang, yang berarti mereka memiliki lebih banyak uang tunai untuk dibelanjakan. Namun, dampak positif ini juga ditentukan oleh kondisi ekonomi tertentu. Menaikkan upah minimum tanpa juga menaikkan harga barang dan jasa tidak akan memiliki efek nyata pada pendapatan rumah tangga. Akibatnya, daya beli masyarakat tetap stagnan. Maka karenanya, apakah peraturan upah minimum efektif dalam meningkatkan daya beli sangat bergantung pada inflasi dan pasar tenaga kerja (ILO, 2024).

Teori Pengangguran

Jika seseorang aktif mencari pekerjaan tetapi belum menemukannya, kita mengatakan bahwa mereka menganggur. Tingkat kemiskinan merupakan indikator kesehatan ekonomi suatu negara karena menunjukkan sejauh mana ekonomi dapat mendukung kebutuhan masyarakat akan pekerjaan.

Salah satu alasan utama mengapa orang hidup dalam kemiskinan, menurut teori Keynesian, adalah karena perusahaan mengurangi produksi dan jumlah pekerja yang dibutuhkan karena rendahnya permintaan agregat. Ketika tingkat kemiskinan meningkat, semakin sedikit orang yang mampu memperoleh penghasilan, yang menyebabkan penurunan konsumsi rumah tangga. Pengeluaran yang lebih sedikit berarti permintaan barang dan jasa yang lebih rendah, yang berarti ekonomi akan melambat.

Tella dkk menemukan bahwa kemiskinan mengurangi kesejahteraan sosial dan kualitas hidup masyarakat selain menyebabkan individu kehilangan uang. Karena mereka tidak mampu membeli makanan, pakaian, dan tempat tinggal, orang-orang dengan tingkat kemiskinan tinggi memiliki pendapatan yang lebih sedikit untuk dibelanjakan. Dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan terbalik antara kemiskinan dan daya beli karena penurunan daya beli merupakan konsekuensi umum dari meningkatnya kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengambil pendekatan yang lebih metodis dengan memanfaatkan regresi linier berganda guna menelaah pengaruh inflasi, UMP, serta TPT terhadap daya beli di Indonesia tahun 2025. Hasil yang lebih objektif dapat diperoleh oleh peneliti yang menggunakan metode ini karena didasarkan pada data yang tersedia untuk umum dan telah diuji secara statistik. Para ilmuwan dapat menggunakan ini untuk menentukan pentingnya relatif dari berbagai faktor.

Studi ini tujuannya ialah guna menjelaskan hubungan sebab-akibat antara karakteristik-karakteristik ini dengan mengujinya secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk mengklarifikasi hubungan antara tingkat kemiskinan terbuka, upah minimum provinsi, dan inflasi di Indonesia dalam hal daya beli. Itulah mengapa model yang dapat menangkap hubungan ini dengan baik sangat penting.

Semua provinsi di Indonesia dipertimbangkan untuk studi ini. Dampak inflasi, UMP, serta TPT terhadap daya beli diteliti dalam studi ini.
Pembatasan ruang lingkup penelitian dilakukan agar menjaga fokus penelitian yang akan berdampak menyelewengi penelitian ke faktor lain yang dapat berdampak pada daya beli. Studi ini ditelaah memanfaatkan data antar provinsi yang memiliki karakteristik berbeda. Perbedaan tersebut mencakup harga, struktur pasar tenaga kerja, tingkat pendapatan masyarakat, dan kebijakan ketenagakerjaan yang berbeda-beda.
Sampel studi terdiri atas 34 provinsi di Indonesia yang dipilih berdasarkan ketersediaan data. Teknik pengambilan sampel adalah sampling jenuh, dimana penentuan sampel dengan memanfaatkan seluruh anggota populasi yang memenuhi kriteria riset sebagai sampel.
Tipe data yang dimanfaatkan ialah data sekunder dalam bentuk data kuantitatif. Data sekunder ialah data yang tak didapat langsung oleh peneliti, namun bersumber dari publikasi atau laporan resmi yang diterbitkan oleh lembaga tertentu. Data yang digunakan meliputi:

1. Data Daya Beli Masyarakat
2. Data Tingkat Inflasi
3. Data UMP
4. Data TPT

Sumber data tersebut berasal dari publikasi resmi lembaga pemerintah, yaitu BPS serta BI.

Variable	Simbol	Definisi Operasional	Satuan
Daya Beli Masyarakat	Y	Kemampuan masyarakat guna memperoleh barang jasa bersumber pada taraf pendapatan masyarakat.	Rupiah
Inflasi	X1	Persentase kenaikan harga barang jasa secara	Persen (%)

		umum di kurung waktu tertentu.	
Upah Minimum Provinsi	X2	Upah minimum ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai standar upah kerja.	Rupiah
Tingkat Pengangguran Terbuka	X3	Persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja.	Persen (%)

Analisis data tersebut diperoleh memanfaatkan metode regresi linear berganda dibantu IBM SPSS 27. Model regresi yang diterapkan dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

- Y= Daya beli masyarakat
- α = Konstanta
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3$= Koefisien regresi
- X1 = Inflasi
- X2 = Upah Minimum Provinsi
- X3 = Tingkat Pengangguran Terbuka
- e = Error Term

Model tersebut digunakan guna meninjau arah korelasi tiap-tiap variabel independen terhadap daya beli masyarakat serta mengukur seberapa besar perubahan daya beli yang terjadi akibat perubahan inflasi, UMP, serta TPT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Data simulasi

Provinsi	Daya Beli	Inflasi	UMP	TPT
Aceh	1290040	2.49	3764730	5.74
Sumatera Utara	1345968	2.11	3098948	5.49
Sumatera Barat	1384738	1.93	2627628	5.88
Riau	944927	3.02	3463296	4.42
Jambi	1161226	2.66	3488112	5.03
Sumatera Selatan	1420301	2.99	4231388	4.05
Bengkulu	750000	2.97	2333864	4.11
Lampung	1163176	2.82	3127754	4.04
Kep. Bangka Belitung	2016202	2.04	4398342	4.6
Kep. Riau	1724083	2.41	5051098	6.13
DKI Jakarta	1935479	2.24	5539481	6.54
Jawa Barat	750000	2.85	1992906	7.35
Jawa Tengah	1077930	2.43	2485645	5.15
DI Yogyakarta	969371	2.75	2542628	3.93
Jawa Timur	1240042	2.46	2721439	4.83
Banten	750000	2.84	3086548	6.89
Bali	1755047	2.31	3103652	3.06
NTB	1262147	2.46	2148746	3.53
NTT	1056210	2.85	2327932	3.19
Kalimantan Barat	1077135	2.75	3067238	4.9
Kalimantan Tengah	1453599	2.4	3026093	3.93

Kalimantan Selatan	1241789	2.66	3634336	4.57
Kalimantan Timur	1192351	2.69	3733175	5.38
Kalimantan Utara	1193476	2.73	3829354	5.17
Sulawesi Utara	800647	2.81	3328370	5.84
Sulawesi Tengah	1028091	2.94	2555610	3.19
Sulawesi Selatan	1343909	2.54	3497900	4.59
Sulawesi Tenggara	1240886	2.46	2714006	3.86
Gorontalo	1774607	2.39	3782109	3.11
Sulawesi Barat	1331923	2.7	2770402	2.9
Maluku	992250	2.77	3245051	5.46
Maluku Utara	1067721	2.9	3117257	4.6
Papua Barat	1388915	2.71	4187425	5.07
Papua	1560328	3	4851734	4.5

***Sumber**: Data Badan Pusat Statistik Indonesia yang telah disimulasi*

Data Penelitian

Studi ini memanfaatkan data *cross-section* yang diambil dari 34 provinsi di Indonesia. Data yang dipakai mencakup variabel daya beli, inflasi, UMP, serta TPT. Semua data dijalankan memanfaatkan IBM SPSS 27 untuk melihat hubungan dan pengaruh antar variabel. Penggunaan data provinsi membuat gambaran tentang kondisi ekonomi yang beragam di indonesia. Perbedaan struktur ekonomi, tingkat pembangunan, tingkat upah, dan kondisi pasar tenaga kerja antar wilayah yang menyebabkan adanya variasi daya beli masyarakat.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Variable	Tolerance	VIF
Inflasi	0,973	1,028
Upah Minimum Provinsi	0,922	1,084
Tingkat Pengangguran Terbuka	0,925	1,081

***Sumber**: Output IBM SPSS 27, diolah peneliti (2026)*

Urgensi dari tes ini ialah guna menentukan apakah terdapat korelasi signifikan antara berbagai variabel yang termasuk model regresi. Akibat multikolinearitas, hasil menjadi kurang dapat diandalkan dan kemampuan untuk menggambarkan hubungan sebenarnya antara variabel berkurang.

Tabel 2 memperlihatkan bahwasanya seluruh variabel berskor VIF < 10 serta nilai toleransi > 0,10. Temuan memperlihatkan bahwasanya variabel independen tak berkorelasi tinggi, sehingga memperkuat gagasan bahwa model regresi tak mengandung multikolinearitas. Dengan demikian, dimungkinkan untuk memisahkan pengaruh berbagai faktor terhadap daya beli konsumen.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3. Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda

Variable	Koefisien Regresi (β)	Std. Error	Beta	Sig.	Keterangan
Konstanta	2,752	(Data internal)		0.000	Signifikan, Positif
Inflasi	-0,68813	(Data internal)	-0.606	0.000	Signifikan, Negatif

UMP	0,267	(Data internal)	0,689	0.000	Signifikan Positif
TPT	-0,12252	(Data internal)	-0,423	0.000	Signifikan, Negatif

***Sumber**: Output IBM SPSS 27, diolah peneliti (2026)*
Keterangan: variabel daya beli disajikan dalam satuan juta rupiah untuk memudahkan interpretasi hasil estimasi regresi.

Berlandaskan temuan estimasi regresi tabel 3, didapatkan regresi di antaranya:
Y= 2.752-0,68813X1+0,267X2-0,12252X3+e
Persamaan tersebut menunjukan inflasi dan tingkat pengangguran terbuka memiliki hubungan negatif pada daya beli masyarakat, sedangkan UMP hubungannya positif terhadap daya beli masyarakat. Nilai konstanta sebesar 2.752.589,706 menunjukkan jika semua variabel independen dianggap konstan, jadi daya beli masyarakat diperkirakan sebesar 2.752.589,706 satuan.

Pengaruh Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat

Berlandaskan temuan regresi Tabel 3, variabel tersebut berkoefisien regresi senilai 0,68813 serta tingkat signifikansi < 0,05. Inflasi pengaruhnya signifikan pada daya beli masyarakat, seperti yang diilustrasikan oleh hal ini. Inflasi menggerogoti daya beli masyarakat, seperti yang terlihat dari koefisien regresi negatif. Nilai koefisien beta senilai 0,68813 merupakan indikasi lain bahwa inflasi merupakan pengaruh signifikan yang memengaruhi perubahan daya beli masyarakat. Temuan studi memperlihatkan bahwasanya inflasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membeli barang. Inflasi menyebabkan masyarakat membutuhkan uang lebih banyak untuk membeli barang serta jasa sama seperti di masa lalu. Akibatnya, inflasi yang signifikan dapat mempersulit masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Pengeluaran rumah tangga merupakan bagian kunci dari permintaan agregat dalam teori ekonomi. Jika masyarakat kesulitan membayar kebutuhan dasar karena inflasi, permintaan agregat akan menurun. Perlambatan pertumbuhan ekonomi mungkin akan terjadi jika permintaan agregat terus menurun.

Temuan studi ini signifikan karena memperlihatkan bagaimana pemerintah mampu mengelola inflasi. Pemerintah harus menerapkan kebijakan untuk menjaga koordinasi yang kuat antara bank sentral dan pemerintah, menstabilkan harga pangan, meningkatkan distribusi produk, dan mengatur harga energi. Dengan cara ini, pemerintah dapat mencegah penurunan permintaan agregat dan menjaga daya beli masyarakat.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Daya Beli Masyarakat

Berlandaskan hasil regresi, variabel UMP koefisien regresinya sebesar 0,267 pada tingkat signifikansi 0,000. Skor p < 0,05 memperlihatkan UMP berdampak signifikan secara statistik terhadap pengeluaran konsumen.

Temuan studi ini menunjukkan peningkatan UMP dapat meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan merupakan faktor utama yang menentukan kemampuan masyarakat untuk melakukan konsumsi. Dalam teori konsumsi Keynes, tingkat konsumsi sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang diterima masyarakat. Jika pendapatan meningkat, maka masyarakat memiliki kemampuan yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika pendapatan turun, konsumsi rumah tangga juga turun.

Menurut para ekonom pembangunan, peningkatan daya beli masyarakat berdampak pada beberapa sektor ekonomi. Ketika konsumen dapat membeli lebih banyak, barang dan jasa menjadi lebih diminati. Ekspansi ini memiliki banyak hasil positif, termasuk peningkatan produksi, investasi, dan penambahan lapangan kerja baru. Menaikkan upah minimum memiliki efek pengganda pada perekonomian. Maka karenanya, inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan upah perlu diteliti lebih lanjut. Membayar karyawan dengan upah tinggi tanpa melihat peningkatan produktivitas mereka dapat menyebabkan lonjakan biaya produksi bagi bisnis. Karena itu, bisnis tidak dapat memperluas tenaga kerjanya.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Daya Beli Masyarakat

Studi menemukans bahanyawa kemiskinan terbuka memiliki koefisien regresi -0,12252 pada tingkat signifikansi 0,000. Ini membuktikan bahwasanya kemiskinan terbuka berefek besar serta merugikan pada daya beli masyarakat umum. Kemiskinan terbuka efeknya substansial pada fluktuasi daya beli publik, seperti yang terlihat dari nilai beta -0,423.

Masalah pengangguran adalah masalah ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran terbuka dapat menurunkan daya beli masyarakat secara signifikan. Secara teori, hubungan negatif antara pengangguran dan daya beli masyarakat dapat dijelaskan melalui teori pendapatan rumah tangga. Ketika seseorang menganggur, mereka tidak memiliki pendapatan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi terbatas.

Pengeluaran domestik ialah mesin utama yang mendorong produk domestik bruto. Akibatnya, peningkatan tingkat pengangguran akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Pengangguran memiliki konsekuensi sosial yang luas, termasuk penurunan kualitas hidup, pelebaran kesenjangan pendapatan, dan kemiskinan yang meluas. Situasi ini akan membuat masyarakat jauh lebih sulit untuk mempertahankan konsumsi yang memadai. Pemerintah harus membuat lapangan kerja supaya mampu mendapat tenaga kerja besar, meningkatkan pajak daerah, dan, pada akhirnya, meningkatkan daya beli masyarakat.

Studi ini menemukan bahwa tiga elemen terpenting yang memengaruhi daya beli adalah pendapatan, stabilitas harga, dan kondisi pasar tenaga kerja. Seluruh variabel yang diperhitungkan di studi ini berdampak signifikan terhadap daya beli. Inflasi (-0,606), UMP (0,689), dan TPT (-0,423) adalah variabel yang paling berpengaruh, seperti yang ditunjukkan oleh nilai beta standar. Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan keluarga adalah komponen terpenting dalam menentukan seberapa banyak masyarakat dapat berbelanja. Jika terjadi inflasi, peningkatan pendapatan tak akan mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karenanya, warga di lingkungan tersebut membutuhkan kebijakan kolaboratif. Jika pemerintah serius ingin meningkatkan pendapatan, pemerintah harus melakukan lebih dari sekadar mengatur upah; pemerintah juga harus menstabilkan harga dan menyediakan kesempatan kerja. Dengan menggabungkan berbagai elemen ini, mampu membuat iklim ekonomi yang lebih stabil sekaligus menaikan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berlandaskan analisis, pada tahun 2025, daya beli Indonesia akan sangat terpengaruh oleh inflasi, UMP, dan TPT.

Berlandaskan temuan studi, inflasi mengurangi daya beli masyarakat. Ketika daya beli masyarakat menurun akibat inflasi, harga produk dan jasa naik. Karena semakin sedikit orang yang memiliki pendapatan yang dapat dibelanjakan, semakin sedikit barang dan jasa yang tersedia bagi mereka.

Sebaliknya, UMP meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan masyarakat. Ketika UMP naik, upah masyarakat naik, dan mereka mampu membayar lebih banyak biaya hidup pokok mereka. Pada kenyataannya, UMP ialah faktor terpenting yang memengaruhi daya beli konsumen. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pendapatan tetap menjadi faktor kunci yang menentukan daya beli masyarakat di Indonesia.

Di sisi lain, daya beli konsumen berkurang akibat tingkat pengangguran terbuka. Ketika tingkat pengangguran meningkat, pendapatan rumah tangga menurun, yang pada gilirannya mengurangi daya beli masyarakat.

Daya beli konsumen telah mengalami pukulan besar akibat inflasi, UMP, dan pengangguran yang meluas. Berbagai faktor yang disebutkan sebelumnya, seperti tingkat pendapatan, kondisi pasar kerja, serta stabilitas harga, memengaruhi daya beli masyarakat. Itulah mengapa ketiga kriteria ini perlu dipertimbangkan secara bersamaan dalam inisiatif yang berupaya meningkatkan daya beli masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Indonesia 2025*. Badan Pusat Statistik.

Bank Indonesia. (2025). *Laporan perekonomian Indonesia 2025*. Bank Indonesia.

Ball, L., & Mankiw, N. G. (2002). *The NAIRU in theory and practice. Journal of Economic Perspectives, 16*(4), 115–136.

Bird, K., & Manning, C. (2008). *Minimum wages and poverty in a developing country: Simulations from Indonesia's household survey. World Development, 36*(5), 916–933. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.05.012

Di Tella, R., MacCulloch, R., & Oswald, A. (2001). *Preferences over inflation and unemployment: Evidence from surveys of happiness. American Economic Review, 91*(1), 335–341. https://doi.org/10.1257/aer.91.1.335

Fitriani, E., & Rahmawati, D. (2022). Pengaruh inflasi terhadap daya beli masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 23*(2), 145–156.

Friedman, M. (1968). *The role of monetary policy. American Economic Review, 58*(1), 1–17.

Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. Macmillan.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2025). *Data upah minimum provinsi tahun 2025*. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Mankiw, N. G. (2021). *Principles of economics* (9th ed.). Cengage Learning.

Prasetyo, A., & Wibowo, T. (2020). Pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan dan daya beli masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 11*(2), 101–114.

Rama, M. (2001). The consequences of doubling the minimum wage: The case of Indonesia. *Industrial and Labor Relations Review, 54*(4), 864–881. https://doi.org/10.1177/001979390105400407

Sari, N., & Putra, R. (2021). Analisis pengaruh upah minimum terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Jurnal Economia, 17*(1), 55–67.

Suryahadi, A., Widyanti, W., Perwira, D., & Sumarto, S. (2003). *Minimum wage policy and its impact on employment in the urban formal sector. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 39*(1), 29–50. https://doi.org/10.1080/00074910302013

Akerlof, G. A., & Yellen, J. L. (1986). Efficiency wage models of the labor market. Cambridge University Press.

Blanchard, O., & Johnson, D. (2021). Macroeconomics (8th ed.). Pearson.

International Labour Organization. (2024). Global wage report 2024–2025: Wage inequality and trends. International Labour Organization.

Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2019). Economics (20th ed.). McGraw-Hill Education.